BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kabupaten Tabalong memiliki posisi yang cukup strategis karena berada di wilayah perbatasan dengan dua provinsi lain di Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Letak strategis ini menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah penghubung antarwilayah yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas barang, jasa, dan penduduk di kawasan Kalimantan.

Secara geografis, Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan karakteristik topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga kawasan hutan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat aksesibilitas antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Beberapa wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur seperti jalan dan transportasi, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Secara administratif, Kabupaten Tabalong terdiri dari beberapa kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tanjung.

Struktur pemerintahan daerah ini memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Namun demikian, luas wilayah dan kondisi geografis yang bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

Dari sisi demografi, Kabupaten Tabalong memiliki jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk ini membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang ada secara efektif melalui kebijakan fiskal daerah, khususnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara ekonomi, Kabupaten Tabalong dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Sektor pertambangan, khususnya batu bara, menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Selain itu, sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, serta sektor pertanian juga menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat. Keberadaan sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun masyarakat.

Namun demikian, potensi ekonomi yang besar tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah serta perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan masih belum merata dan perlu ditingkatkan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Tabalong terus melakukan berbagai program pembangunan yang didanai melalui APBD, seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Belanja pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Secara empiris, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih perlu terus didorong agar tercapai kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.

Kabupaten Tabalong ialah salah satau kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota Kabupaten Tabalong terletak di Kecamatan Tanjung. Luas Kabupaten Tabalong yakni 2.553,36 $km^{2.}$

Tabel 4. 1
Luas Kabupaten Tabalong Menurut Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Luas (km^2)
Banua Lawas	150.86
Pugaan	31.87
Kelua	53.39
Muara Harus	26.78
Tanta	149.73
Tanjung	191.69
Murung Pudak	172.48
Haruai	271.97
Bintang Ara	1.170.19
Upau	183.01
Muara Uya	877.13
Jaro	274.26
Jumlah	**2. 553.36**

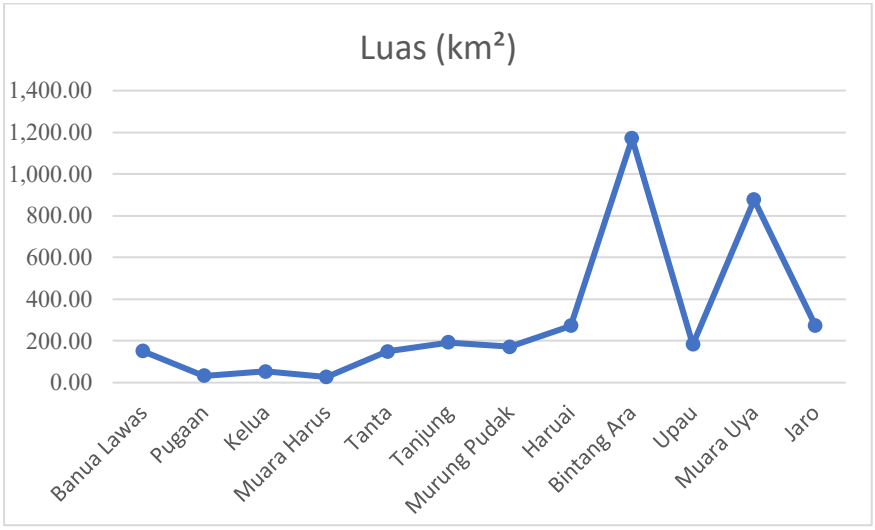
Sumber: BPS Kabupatan Tabalong Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukan bahwa di Kecamatan Bintang Ara merupakan Kecamatan paling luas diantara Kecamatan lain dengan luas

area 1.170.19 Km dengan persentase sebanyak 32.94%, dan Kecamatan Pugaan merupakan Kecamatan paling kecil dengan luas area 31.87 Km.

Grafik 4. 1

Luas Kabupaten Tabalong Menurut Kecamatan Tahun 2025



Sumber: Grafik diolah tahun 2026

2. Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas variabel kesejahteraan masyarakat yang di ukur menggunakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen dan belanja modal, dana alokasi khusus dan gini ratio sebagai variabel independen. Adapaun gambaran mengenai perkembangan masing-masing variabel penelitian disajikan pada uraian berikut.

b. Data Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Tabalong

Pada penelitian ini menyajikan data perkembangan dana belanja modal di Kabupaten Tabalong dari tahun 2015-2024. Data yang disajikan ialah berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.

Tabel 4. 2

Belanja Modal Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

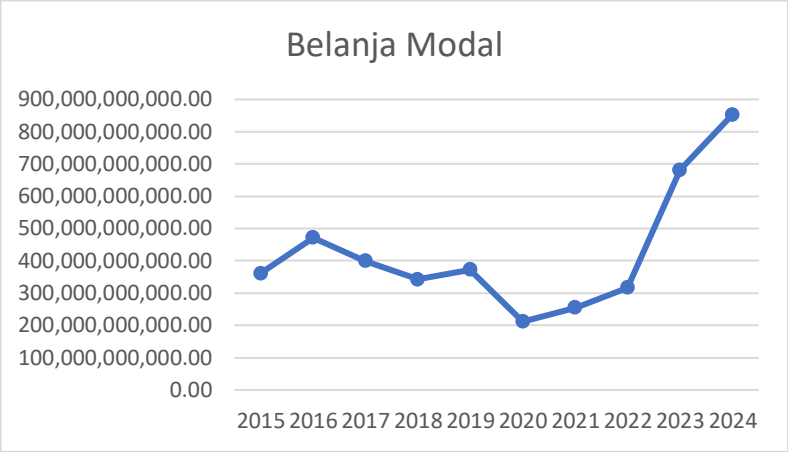
Tahun	Belanja Modal (Rp)
2015	360,905,045,930.00
2016	471,516,477,837.00
2017	399,208,770,071.00
2018	342,675,726,079.00
2019	372,820,378,105.00
2020	211,529,503,424.00
2021	254,822,134,515.00
2022	316,945,108,640.00
2023	681,688,599,520.00
2024	853,150,824,196.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2025

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa secara umum bahwa belanja modal di Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 sampai 2024 mengalami fluktiatif dari tahun ke tahun.

Grafik 4. 2

Belanja Modal Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024



Sumber: Grafik diolah tahun 2026

Jika dilihat pada grafik 4.2 bahwa jumlah belanja modal di Kabupaten Tabalong menunjukan tren fluktuatif pada setiap tahunnya dari tahun 2015-2024. Di tahun 2015 nominal belanja modal sebesar Rp 360.905.045.930,00. Kemudian mengalami peningkatakan pada tahun 2016 yaitu mencapai sebesar Rp 471.516.477.837,00 dan kembali mengalami penurunan pada periode 2020 yaitu sebesar Rp 211.529.503.424,00. Hal ini di sebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah daerah melakukan *refocusing* anggaran, yang mana sebagian besar anggaran dialihkan untuk penanganan sektor kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga alokasi belanja modal mengalami pengurangan. Kemudian tingkat belanja modal tertinggi pada tahun 2024 dengan total belanja sebesar Rp 853.150.824.196,00.

c. Data Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

Pada penelitian ini menyajikan data perkembangan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tabalong dari tahun 2015-2024. Data yang disajikan ialah berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.

Tabel 4. 3

Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

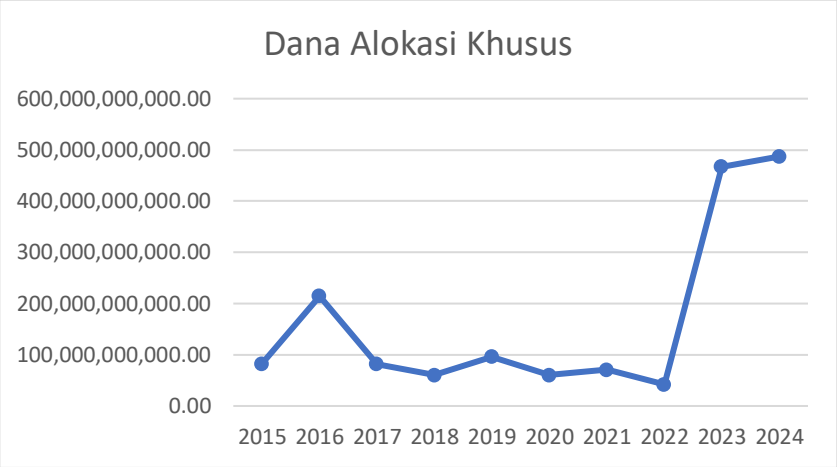
Tahun	Dana Alokasi Khusus (Rp)
2015	82,353,550,000.00
2016	214,743,984,008.00
2017	81,865,355,908.00
2018	60,642,926,092.00
2019	96,145,565,068.00
2020	60,549,078,870.00
2021	70,914,290,813.00
2022	42,086,658,120.00
2023	467,307,055,590.00
2024	487,037,200,230.00

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong 2025

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa secara umum bahwa belanja modal di Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 sampai 2024 mengalami fluktiatif dari tahun ke tahun.

Grafik 4. 3

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024



Sumber: Grafik diolah tahun 2026

Pada grafik 4.3 menyatakan bahwa dana alokasi khusus di Kabupaten Tabalong bersifat fluktuatif. Dana alokasi khusus terbesar terjadi di tahun 2024 dengan total dana sebesar Rp 487.037.200.230,00, sedangkan dana alokasi khusus terkecil terjadi pada tahun 2022 dengan total dana sebesar Rp 42.086.658.120,00. Perubahan yang terjadi disetiap tahunnya kareana dana yang dialokasikan pada kegiatan investasi seperti pembangunan, pengadaaan, peningkatan, serta perbaikan sarana dan prasarana fisik ydengan umur ekonomis yang panjang, termasuk fasilitas pendukung lainnya.

d. Data Perkembangan Ratio Gini Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

Pada penelitian ini menyajikan data perkembangan dana Ratio Gini di Kabupaten Tabalong dari tahun 2015-2024. Data yang disajikan ialah berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong.

Tabel 4. 4

Ratio Gini Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

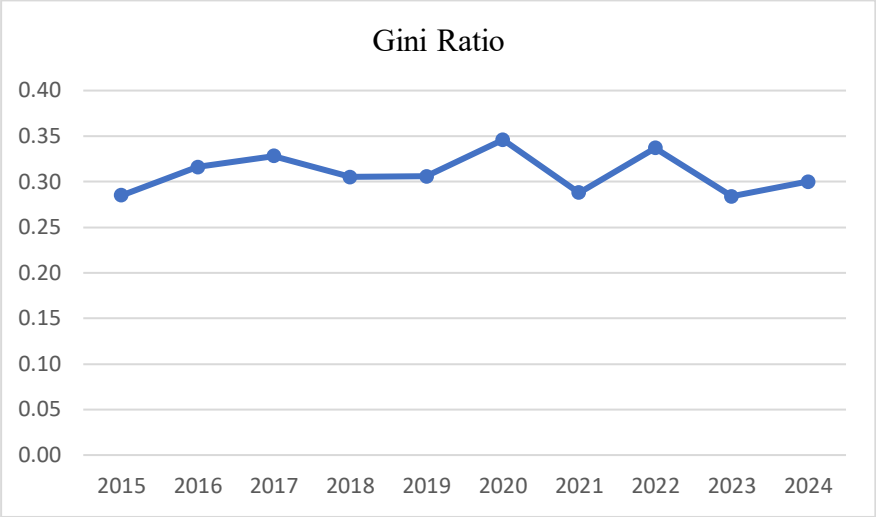
Tahun	*Gini Ratio*
2015	0,29
2016	0,32
2017	0,33
2018	0,31
2019	0,31
2020	0,35
2021	0,29
2022	0,34
2023	0,28
2024	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa secara umum bahwa ratio gini di Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 sampai 2024 mengalami fluktiatif dari tahun ke tahun.

Grafik 4. 4

Ratio Gini Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024



Sumber: Grafik diolah tahun 2026

e. Data Perkembangan Kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

Pada penelitian ini menyajikan data perkembangan kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tabalong dari tahun 2015-2024. Data yang disajikan ialah berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong

Tabel 4. 5

IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024

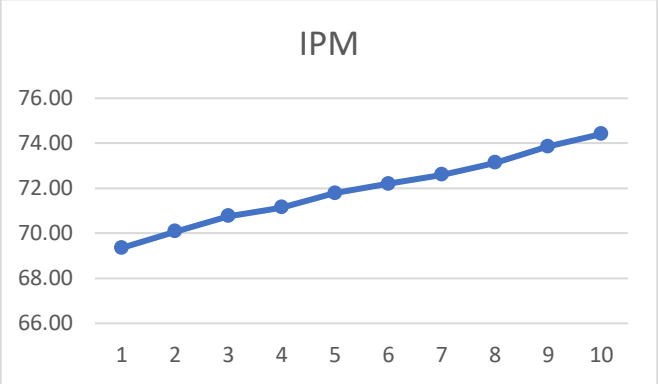
Tahun	IPM
2015	69,35

2016	70,07
2017	70,76
2018	71,14
2019	71.78
2020	72.19
2021	72.60
2022	73.13
2023	73.85
2024	74.41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Grafik 4. 5

Indeks Pembangunan Manusai Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2024



Sumber: Grafik diolah tahun 2026

Pada grafik 4.5 menunjukan bahwa jumlah indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tabalong menunjukan tren naik pada setiap tahunnya. Dari tahun 2015 jumlah indeks pembangunan manusia menunjukan angka terendah yaitu 69.35. kemudian indeks pembangunan

manusia peningkatan terus menerus hingga tahun 2024 yaitu sebesar 74.41.

3. Hasil Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengambilan keputusan dalam pengujian dalam normalitas adalah sebagai berikut (Basuki, 2017):

Tabel 4. 6
Uji Normalitas

Kriteria	Nilai	Keterangan
Asym.Sig (2-Tailed)	0,200	Residual Berdistribusi Normal

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan bantuan SPSS, 2026.

Berdasarkan tabel uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov-Test* diketahui bahwa nilai *Asym.Sig* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2) Uji Mutikolinearitas

Untuk melihat adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Apabila nilaiVIF kurangdari 10, hal ini menujukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan di ataras variabel independen dalam regresi.

Tabel 4. 7

Uji Multikolonialitas

Variabel independen	Kriteria Multikolonialitas	
	VIF	**Toleransi**
Belanja Modal (X_1)	1.081	0,925
Dana Lokasi Khusus (X_2)	1.279	0,782
Ginj ratio (X_3)	1.312	0,762

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan bantuan SPSS, 2026.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji multikolinealitas diketahui nilai *tolerance* pada variabel belanja modal sebesar 0,925, dana alokasi khusus sebesar 0,782, dan Gini ratio sebesar 0,762 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF variabel belanja modal sebesar 1.081, dana alokasi khusus sebesar1, 279 dan gini ratio sebesar 1,312 lebih kecil dari 10,00. Disimpulkan bahwa tidak terjadi Multikolinielitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.(Rachman dkk., 2022)

Tabel 4. 8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel independen	Nilai signifikansi	Keterangan
Belanja Modal (X_1)	0,684	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Dana Lokasi Khusus (X_2)	0,141	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Gini Ratio (X_3)	0,741	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan bantuan SPSS, 2026.

4) Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t-1 (sebelumnya). Apabila terdapat korelasi, maka model regresi mengalami masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi umumnya menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat diambil patokan sebagai berikut (Sunyono, 2011):

1. Angka DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif.
2. Angka DW diantara -2 samapai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi.
3. Angka DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Autokorelasi

Variabel Dependen	Variabel Independen	Statistik Durbin-Watson
IPM (Y)	Belanja Modal (X_1)	1,402
	Dana Lokasi Khusus (X_2)	
	Gini Ratio (X_3)	

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan bantuan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Durbin Watson persamaan regresi pada penelitian ini adalah 1.402 yang masih berada pada kisaran tidak ada autokorelasi, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah auto korelasi pada persamaan regresi dalam penelitian ini.

b. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen, yang dapat dilihat dari nilai koefesien untuk setiap variabel independen.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel independen yaitu belanja modal, dana alokasi khusus, dan Gini Ratio, sedangkan varriabel dependen yaitu kesejahteraan yang di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4. 10

Analisis Regresi Berganda

Variabel	***Unstandardized Coefficients***
Konstan	69,19
Belanja Modal (X_1)	-4,72
Dana Lokasi Khusus (X_2)	5,432
Gini ratio (X_3)	7,789

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan bantuan SPSS, 2026.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil yang diperoleh dari tabel koefisien regresi, dapat dirumuskan suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 69{,}19 + \text{-}4{,}72\ X_1 + 5{,}432\ X_2 + 7{,}789\ X_3$$

Interpretasi:

1) Nilai Konstan (a) memiliki nilai positif 69,19. Tanda positif artinya menunjukan pengaruh yang searah variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi belaja modal (X_1), dana lokasi khusus (X_2) dan gini ratio (X_3) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kesejahteraan masyarakat adalah 69,19.
2) Nilai koefisien regresi Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar-0,474 terhadap variabel dependen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Belanja Modal dan kesejahteraan masyarakat

bersifat negatif. Artinya, setiap peningkatan Belanja Modal sebesar 1%, maka nilai variabel kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan sebesar 0,474 satuan, dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap konstan.

3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Dana Lokasi Khusus (X_2) yaitu sebesar 5,432 Nilai tersebut menunjukan pengaruh yang positif antara variabel Dana Lokasi Khusus dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini artinya jika variabel Dana Lokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami kenaikan sebesar 5,432. Dengan asumsi bahwa variabel lainya tetap atau konstan.
4) Nilai koefisien regresi untuk variabel gini ratio (X_3) yaitu sebesar 7,789 Nilai tersebut menunjukan pengaruh yang positif antara variabel gini ratio dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini artinya jika variabel gini ratio kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya variabel kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami kenaikan sebesar 7,789. Dengan asumsi bahwa variabel lainya tetap atau konstan.

c. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien Deteminasi yang disimbolkan dengan R^2 pada prisipnya melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ketika nilai koefisien determinasi kecil, hal ini mengidentifikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model	***Adjusted R Square***
1.	0,531

Sumber: Diolah oleh Peneliiti dengan bantuan SPSS, 2026.

Berdasarkan Tabel uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,531 belanja modal, dana lokasi khusus dan gini ratio mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 53,1% sedangkan sisanya 46,9% tidak diteliti pada penelitian ini.

d. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh masing masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji t ialah pengujian pada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

t tabel = (a /2 : n – k – 1)

= (0,05/2 :10 – 2)

= 8

Keterangan:

a = Nilai Probabilitas (0,05)

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Independen.

Dengan tingkat signifikansi 0,05. Maka diketahui nilai t tabel yaitu sebesar 2,306. Berikut hasil Perhitungan Uji t pada penelitian ini.

Tabel 4. 12

Uji Parsial

Variabel	t hitung	sig	Keterangan
Belanja Modal (X_1)	-2,373	0,55	$H_0$1 diterima
Dana Lokasi Khusus (X_2)	2,200	0,070	$H_0$2 diterima
Gini ratio (X_3)	0,400	0,703	$H_0$3 diterima

Sumber: Diolah oleh Peneliti dengan bantuan SPSS, 2026.

a) Pengaruh belanja modal secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t sebesar – 2,373 lebih kecil dari 2,306 dengan nilai sig > 0,05 yaitu 0,55. Artinya hipotesis $H_0$1 diterima. Artinya variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

b) Pengaruh dana lokasi khusus secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t sebesar 2,200 lebih kecil dari 2,306 dengan nilai sig > 0,05 yaitu 0,070. Artinya hipotesis $H_0$2 diterima. Artinya variabel dana lokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

c) Pengaruh ketimpang secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t sebesar 0,400 lebih kecil dari 2,306 dengan nilai sig > 0,05 yaitu 0,703. Artinya hipotesis $H_0$3 diterima. Artinya variabel gini ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji yang dipakai untuk menganalisis terdapat tidaknya pengaruh dengan cara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dengan metode menyamakan antara angka F hitung dengan F tabel pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan df = (n-k-1).

F tabel = a ; (k; n – k – 1)

= 0,05 (2 ; 100 - 2 – 1)

= 7

Keterangan:

a = Nilai Probabilitas (0,05)

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel Independen

Tabel 4. 13

Uji Simultan

Model	F	Sig.
Regression	5,23	0,000

Sumber: Diolah oleh Peneliiti dengan bantuan SPSS, 2026.:

Berdasarkan tabel uji F, dapat diketahui bahwa nilai f hitung > f tabel sebesar 5,23 > 4,74 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa H_a diterima yang artinya variabel belanja modal, dana alokasi khusus dan gini ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Pembahasan

Berdasarkan tinjauan yang telah penulis paparkan sebelumnya, keseluruhan pembahasaan mengenai hasil penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan diukur dari Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Belanja Modal memperoleh nilai t hitung sebesar -2,373 dengan nilai signifikansi sebesar 0,055. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H01 diterima dan Ha1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Tabalong yang diproksikan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pemerintah telah meningkatkan pengeluaran pada sektor belanja modal, namun manfaat dari pengeluaran tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara langsung. Hal ini dapat terjadi karena belanja modal umumnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, gedung, sarana prasarana, jaringan, serta fasilitas umum lainnya yang manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Selain itu, pembangunan fisik tidak selalu secara langsung mampu meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang menjadi komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Yulianti & Qomariah, 2025b) Dampak pembangunan infrastruktur biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, selama periode penelitian 2015–2024 pengaruh belanja modal terhadap IPM belum terlihat signifikan secara statistik.

Hasil koefisien regresi menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan negatif sebesar -0,474 terhadap kesejahteraan masyarakat. hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan belanja modal justru diikuti

penurunan IPM, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan pengalokasian anggaran belanja modal pada sektor yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah kemungkinan masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dibandingkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasriadi (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Imam Agus Sutono (2022) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah daerah belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila penggunaannya belum efektif dan belum tepat sasaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong karena pembangunan yang dilakukan masih bersifat jangka panjang, pengalokasian anggaran belum optimal pada sektor

peningkatan kualitas manusia, serta dampak pembangunan fisik membutuhkan waktu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memperoleh nilai t hitung sebesar 2,200 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,070. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga $H_0$2 diterima dan Ha2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong

Meskipun tidak berpengaruh signifikan, hasil regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki arah hubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 5,432. Hal ini menunjukkan bahwa secara teori peningkatan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik.

Tidak signifikannya pengaruh DAK terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terjadi karena pemanfaatan Dana Alokasi Khusus lebih banyak diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik daerah. Pembangunan tersebut memang penting untuk menunjang aktivitas masyarakat, namun manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung dalam waktu singkat terhadap

peningkatan IPM. Oleh karena itu, peningkatan DAK belum mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat selama periode penelitian.

Selain itu, realisasi DAK yang cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun juga dapat menyebabkan dampak pembangunan menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, Dana Alokasi Khusus memiliki selisih nilai minimum dan maksimum yang cukup jauh sehingga menunjukkan adanya ketidakstabilan alokasi dana selama periode penelitian. Ketidakstabilan tersebut menyebabkan pembangunan daerah yang dibiayai DAK belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.(Ro'asih dkk., 2026)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasriadi (2022) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan manusia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa DAK tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun pengaruhnya masih terbatas.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong karena realisasi dan pemanfaatannya belum optimal, pembangunan yang dilakukan masih bersifat jangka panjang, serta manfaat program yang didanai DAK belum secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,070 > 0,05, sehingga DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara teori fiskal desentralisasi, Dana Alokasi Khusus merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan membantu pendanaan kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, secara teoritis DAK diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Tidak signifikannya pengaruh DAK terhadap IPM dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penggunaan DAK sering kali lebih berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana dibandingkan peningkatan kualitas layanan secara langsung. Kedua, efektivitas penyerapan anggaran DAK di daerah belum tentu optimal sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ketiga, dampak DAK terhadap peningkatan IPM memerlukan waktu yang relatif panjang karena hasil pembangunan fisik tidak langsung meningkatkan angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita.

Selain itu, adanya fluktuasi DAK yang cukup tinggi selama periode penelitian menunjukkan bahwa besarnya dana yang diterima daerah tidak selalu stabil dari tahun ke tahun, sehingga pengaruhnya terhadap IPM menjadi kurang konsisten. Hasil penelitian juga sesuai dengan penelitian pada Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Raja Ampat yang menunjukkan bahwa beberapa jenis dana pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan

infrastruktur, tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM karena manfaatnya membutuhkan waktu untuk dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya DAK yang diterima belum mampu secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan manusia selama periode penelitian.

3. Pengaruh gini ratio terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel gini ratio memiliki nilai signifikansi sebesar 0,703 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara teori, gini ratio yang tinggi dapat menghambat pembangunan manusia karena distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, secara teoritis ratio gini seharusnya berpengaruh terhadap IPM.(Ro'asih dkk., 2026)

Namun, dalam penelitian ini gini ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Salah satu penyebabnya adalah tingkat gini ratio selama periode penelitian relatif rendah dan stabil. Nilai rata-rata Gini Ratio sebesar 0,309 dengan rentang nilai yang tidak terlalu jauh menunjukkan bahwa gini ratiodi daerah penelitian berada pada kategori rendah hingga sedang. Kondisi tersebut menyebabkan variasi gini ratio antar tahun menjadi kecil sehingga tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan IPM. Selain itu, peningkatan IPM tidak hanya dipengaruhi oleh distribusi pendapatan, tetapi juga oleh berbagai faktor

lain seperti kualitas layanan pendidikan, layanan kesehatan, kebijakan pemerintah, investasi sumber daya manusia, serta program perlindungan sosial.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat gini ratiomasyarakat masih dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesehatan melalui berbagai program pemerintah sehingga pengaruh gini ratio terhadap IPM menjadi tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan tingkat ketimpangan selama periode penelitian belum cukup besar untuk memengaruhi perkembangan IPM secara nyata.

4. Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan gini ratio terhadap IPM Secara Simultan

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5, 23 dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan gini ratio secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masing-masing variabel secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan, namun ketika dikombinasikan ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan perubahan IPM. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor secara bersamaan.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,531 menunjukkan bahwa 53,1% variasi IPM dapat dijelaskan oleh belanja modal, dana alokasi khusus, dan gini ratio, sedangkan sisanya sebesar 46,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran,

pendapatan per kapita, kualitas pelayanan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, peningkatan IPM tidak cukup hanya melalui peningkatan belanja modal, DAK, atau pengurangan gini ratio secara terpisah, tetapi memerlukan sinergi kebijakan pembangunan yang komprehensif agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.